



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No.2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Implementasi Program-program British Council dalam
Diplomasi Publik Inggris terhadap Indonesia 2017-2019
dalam rangka memelihara hubungan baik di antara
kedua negara**

Skripsi

Oleh

Reshal Bhakti Arsyad Suroto

6091801102

Bandung

2023



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No.2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Implementasi Program-program British Council dalam
Diplomasi Publik Inggris terhadap Indonesia 2017-2019
dalam rangka memelihara hubungan baik di antara
kedua negara**

Skripsi

Oleh

Reshal Bhakti Arsyad Suroto

6091801102

Pembimbing

Dr. Atom Ginting Munthe, M.S.

Bandung

2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Reshal Bhakti Arsyad Suroto
Nomor Pokok : 6091801102
Judul : Implementasi Program-program British Council dalam Diplomasi Publik Inggris terhadap Indonesia 2017-2019 dalam rangka memelihara hubungan baik di antara kedua negara

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 19 Januari 2023
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

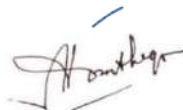
Ketua sidang merangkap anggota

Jessica Martha, S.IP., M.I.Pol.

: 

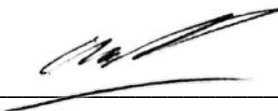
Sekretaris

Dr. Atom Ginting Munthe, M.S.

: 

Anggota

Marshell Adi Putra, S.IP., MA.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Reshal Bhakti Arsyad Suroto
NPM : 6091801102
Jurusan : Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana
Judul : Implementasi Program-program British Council dalam
Diplomasi Publik Inggris terhadap Indonesia 2017-2019
dalam rangka memelihara hubungan baik di antara kedua
negara

Dengan ini menyatakan bahwa tulisan skripsi ini merupakan hasil karya tulis sendiri dan bukan merupakan karya tulis orang lain yang sebelumnya pernah digunakan oleh pihak lain untuk memperoleh gelar apapun. Adapun sumber-sumber dari pihak lain yang digunakan dikutip dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku, apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 4 Januari 2023



Reshal Bhakti Arsyad Suroto
6091801102

ABSTRAK

Nama: Reshal Bhakti Arsyad Suroto

NPM: 6091801102

Judul: Implementasi Program-program British Council dalam Diplomasi Publik Inggris terhadap Indonesia 2017-2019 dalam rangka memelihara hubungan baik di antara kedua negara

Terjadinya proses globalisasi telah berpengaruh kepada berubahnya cara atau metode yang diambil oleh negara-negara dalam melakukan diplomasi. Kini banyak negara yang lebih mengandalkan hal-hal seperti kebudayaan yang mereka miliki untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka, salah satunya yakni Inggris melalui British Council. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program-program dari British Council dalam kebijakan diplomasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah Inggris terhadap Indonesia. Oleh karena itu pertanyaan yang muncul adalah “*bagaimana implementasi program-program British Council dalam Diplomasi Publik Inggris terhadap Indonesia 2017-2019 dalam rangka memelihara hubungan baik di antara kedua negara?*” Dalam penelitian ini kerangka pemikiran yang digunakan adalah konsep atau teori *soft power* dan diplomasi publik oleh Joseph Nye. Hasilnya penulis menemukan bahwa implementasi program-program organisasi ini dijalankan sesuai dengan bidang-bidang yang menjadi keahlian organisasi ini yaitu Bahasa Inggris, pendidikan, seni kebudayaan, serta kemasyarakatan. Selain dibuat agar dapat menarik minat dan perhatian masyarakat Indonesia, namun program-program ini juga dibuat agar dapat tercipta suatu hubungan-hubungan jangka panjang dan kerjasama yang kemudian akan semakin membantu dalam mempertahankan hubungan kedua negara yang selama ini sudah cukup baik.

Kata kunci: diplomasi publik, implementasi, kepentingan nasional, pengaruh, Bahasa Inggris, kebudayaan,

ABSTRACT

Name: Reshal Bhakti Arsyad Suroto

Student number: 6091801102

Title: Implementation of British Council's Programmes in UK Public Diplomacy towards Indonesia 2017-2019 in maintaining good relations between the two countries

Globalization has affected the ways and methods countries use in practicing diplomacy. Nowadays countries tend to use their cultural resources in order to achieve a number of their national interests with one of them being The UK through the British Council. The purpose of this research is to find out how is the implementation of British Council programmes in The UK's public diplomacy towards Indonesia. Which begs the question "how is the implementation of British Council's Programmes in UK Public Diplomacy towards Indonesia 2017-2019 in maintaining good relations between the two countries?" In this research the theoretical frameworks used are the concepts of soft power and public diplomacy by Joseph Nye. The result shows that the implementation of their programmes are being done accordingly to this organization's expertises which are English Language, education, arts and cultures, and also societies. Not only are these programmes being made to attract the Indonesian citizens' attention, but they were also designed so that long-term relations and cooperations can be formed from them which will help both countries in maintaining their already good relations.

Keywords: *public diplomacy, implementation, national interests, influence, English language, culture*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas kehendaknya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Program-program British Council dalam Diplomasi Publik Inggris terhadap Indonesia 2017-2019 dalam rangka memelihara hubungan baik di antara kedua negara” ini sebagai salah satu syarat akhir dalam menempuh gelar sarjana (S1) dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Disini penulis menyadari bahwa penyampaian hasil penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena nya penulis sangat terbuka dan akan menerima kritikan-kritikan yang membangun terhadap karya tulis ini. Penulis juga berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya.

Bandung 4 Januari, 2023



Reshal Bhakti Arsyad Suroto

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	I
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	II
ABSTRAK	III
ABSTRACT	IV
KATA PENGANTAR.....	V
UCAPAN TERIMA KASIH	VI
DAFTAR ISI.....	VII
DAFTAR AKRONIM.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH	5
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	5
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	7
1.2.3 Perumusan Masalah	8
1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	8

1.4 KAJIAN LITERATUR	9
1.5 KERANGKA TEORI.....	13
1.6 METODE PENELITIAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA	19
1.6.1 Metode Penelitian	19
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	19
1.7 SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	20
BAB 2	21
BRITISH COUNCIL SEBAGAI INSTRUMEN DIPLOMASI PUBLIK	
INGGRIS	21
2.1 INGGRIS DAN KEPENTINGAN NASIONAL NYA	22
2.1.1 Profil Negara Inggris	22
2.1.2 Kepentingan Nasional dan Diplomasi Publik Inggris.....	25
2.1.3 Keterkaitan British Council dengan Pemerintah Inggris	29
2.2 SEJARAH AWAL BERDIRINYA BRITISH COUNCIL	31
2.3 PROFIL BRITISH COUNCIL.....	33
2.3.1 British Council Selaku Organisasi Kebudayaan dan Pendidikan	33
2.3.2 Visi & Misi	34
2.3.3 Strategi	34
2.4 PROGRAM-PROGRAM BRITISH COUNCIL.....	35
2.4.1 Program edukasi	36
2.4.2 Program Bahasa Inggris.....	38
2.4.3 Program-program lainnya	40
BAB 3	42

DIPLOMASI PUBLIK INGGRIS MELALUI IMPLEMENTASI PROGRAM-PROGRAM BRITISH COUNCIL DI INDONESIA 2017-2019	42
3.1 IMPLEMENTASI PROGRAM-PROGRAM BRITISH COUNCIL DI INDONESIA 2017-2019.....	43
3.1.1. Kursus dan tes Bahasa Inggris	43
3.1.2 Pameran-pameran pendidikan Inggris	45
3.1.3 School Counsellor Seminar March 2018.....	47
3.1.4 Newton Fund Indonesia	48
3.1.5 UK / ID Festival 2017 dan 2018.....	49
3.1.6 Premier Skills Indonesia	54
3.2 ANALISIS UPAYA DIPLOMASI PUBLIK INGGRIS DALAM MENCAPAI KEPENTINGAN NASIONAL NYA MELALUI IMPLEMENTASI PROGRAM-PROGRAM BRITISH COUNCIL DI INDONESIA	55
BAB 4	63
KESIMPULAN	63
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR AKRONIM

ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
APPG	: All-Party Parliamentary Group
BC	: British Council
CEFR	: Common European Framework of Reference for Languages
CPD	: Continuing Professional Development
DJ	: Disc jockey
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
FCDO	: Foreign, Commonwealth & Development Office
FCO	: Foreign Commonwealth Office
FO	: Foreign Office
IELTS	: International English Language Testing System
KBM	: Kegiatan belajar mengajar
ODA	: Office Development Assistance
PGMOL	: Professional Game Match Officials Limited
PM	: Perdana menteri
SCBD	: Sudirman Central Business District
SDM	: Sumber daya manusia

UK : United Kingdom

USD : United States Dollars

USIA : United States Information Agency

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Gambar 2.1 Peta wilayah Inggris.....	22
Gambar 2.2	Populasi Inggris dan Wales berdasarkan etnis (tidak termasuk kulit putih asli Inggris.....	24
Gambar 2.3	Logo Organisasi British Council.....	33

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Negara diyakini oleh sekian banyak *scholar* ilmu hubungan internasional merupakan aktor utama dalam dunia internasional. Tak adanya satupun pihak hegemon yang berkedudukan paling tinggi di antara sekian banyaknya negara yang ada telah membuat dunia internasional dapat dikatakan bersifat anarki sehingga sangat berpotensi bagi suatu konflik untuk timbul sewaktu-waktu. Melihat situasi tersebut tentunya merupakan hal yang wajar apabila suatu negara ingin menjadi yang terkuat agar dapat bertahan hidup (*survive*) serta mempertahankan kepentingannya (*national interest*). Tentu sudah merupakan hal yang sangat lazim bagi suatu negara untuk mengandalkan kekuatan militer yang mereka punya untuk menjadi yang terkuat, dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Akan tetapi pada kenyataannya hanya semata-mata mengandalkan kekerasan saja tidak cukup bagi suatu negara untuk memenuhi kepentingan nasional mereka. Menurut pandangan kaum liberal suatu negara tak bisa hanya hidup sendiri, mereka juga sewaktu-waktu akan membutuhkan negara lain.¹ Oleh karenanya kerjasama internasional serta diplomasi kini relatif lebih sering diandalkan oleh negara-negara

¹ Tim Dunne, Milaj Kurki, & Steve Smith. *International Relations Theories: Discipline and Diversity*. Oxford University Press, 2013, 94-95.

untuk mewujudkan kepentingan nasional mereka masing-masing daripada menggunakan ancaman militer.

Tentunya alasan bagi negara-negara yang ada di dunia melakukan diplomasi adalah salah satunya untuk menyebarkan pandangan serta pengaruh mereka kepada negara-negara lainnya. Upaya mempengaruhi negara lain dengan cara yang halus seperti ini juga dikenal dengan istilah *soft power*, dimana lebih banyak melibatkan pihak-pihak non-militer. Interaksi antar negara melalui cara ini dilakukan sebab sangat penting bagi suatu negara untuk memiliki atau membangun reputasi yang baik di mata kancah internasional. Ketika suatu negara berhasil mendapat anggapan sebagai suatu negara yang ‘baik’ di mata negara-negara lainnya, maka tentunya akan menjadi lebih mudah bagi negara tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin mereka capai sebab mereka memiliki banyak dukungan dari pihak negara-negara lain.

Terjadinya globalisasi pada beberapa dekade terakhir ini juga membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap praktik diplomasi. Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi membuat pertukaran budaya, pemikiran, cara pandang, serta ilmu pengetahuan semakin pesat dan sulit dikendalikan. Hal tersebut pada akhirnya mendorong semakin berkembangnya yang disebut sebagai diplomasi publik. Salah satu negara yang menggunakan strategi diplomasi publik dalam mencapai kepentingan-kepentingannya adalah Inggris atau Britania Raya melalui Organisasi British Council.

British Council merupakan suatu lembaga atau organisasi internasional bentukan Inggris yang berfokus pada aspek kebudayaan serta pendidikan. Hadirnya organisasi ini memiliki tujuan membangun hubungan baik jangka panjang serta pemahaman antara Inggris dan negara-negara lain yang ada di dunia melalui pengenalan seni, budaya, pendidikan serta bahasa Inggris.² Saat ini British Council berstatus sebagai badan publik eksekutif non-departemen serta mendapat sokongan dana dari *The Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO)*.³ FCDO sendiri merupakan badan yang bertujuan mewujudkan kepentingan nasional Inggris serta menunjukkan Inggris sebagai suatu kekuatan yang ada demi kebaikan dunia.⁴ Mereka juga mempromosikan kepentingan masyarakat Inggris, menjadi pelindung, mempertahankan nilai-nilai mereka serta mengklaim bahwa mereka juga mengurangi kemiskinan serta menyelesaikan isu-isu global yang ada bersama rekan-rekan internasional mereka.⁵ Dulunya dikenal juga sebagai FCO atau *Foreign and Commonwealth Office*.

Di Indonesia British Council pertama kali mendirikan kantornya pada tahun 1948 di Bandung, Jawa Barat ketika masih dikenal dengan sebutan The Council sebelum akhirnya pindah kantor ke Jakarta pada tahun 1953.⁶ Meskipun sempat beberapa kali terjadi sejumlah permasalahan, namun hingga saat penelitian ini

² British Council. About Us. <https://www.britishcouncil.org/about-us> (diakses 26 September 2021).

³ Ibid.

⁴ Gov.uk. Foreign, Commonwealth & Development Office: About Us. <https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-development-office/about> (diakses 26 September 2021).

⁵ Ibid.

⁶ British Council Indonesia. Sejarah Kami. <https://www.britishcouncil.id/tentang/sejarah> (diakses 27 September 2021).

dibuat British Council masih terus beroperasi di Indonesia, dengan kantor yang tersebar di sejumlah kota seperti Jakarta, Yogyakarta serta Surabaya. Beberapa program yang dilakukan antara lain menyangkut hal-hal yang terkait dengan pendidikan, seni serta kebudayaan, namun salah satu program mereka yang paling dikenal adalah *International English Language Testing System (IELTS)*. IELTS merupakan suatu program tes Bahasa Inggris yang diklaim dapat membuka kesempatan untuk hidup, belajar, serta bekerja di berbagai negara di dunia. Selain itu mereka juga memiliki banyak program-program lainnya di bidang pendidikan, kemasyarakatan, serta kebudayaan, Program-program tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk nyata dari upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh Inggris melalui Organisasi British Council ini. Hal yang mereka tawarkan tersebut tentunya berpotensi menarik minat orang-orang sebab manfaatnya yang cukup menjanjikan, serta bagi Inggris sendiri program ini juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan pengaruh mereka terhadap orang-orang Indonesia yang mengikuti program-program mereka tersebut.

Alasan penulis memilih topik ini untuk dikaji sebab seperti yang sudah sempat disebutkan sebelumnya bahwa praktik diplomasi yang bersifat non-tradisional seperti ini, dimana dilakukan melalui jalur pertukaran budaya sedang marak digunakan oleh negara-negara di dunia untuk menyebarkan pengaruhnya dalam beberapa dekade terakhir. Sehingga sangat menarik untuk melihat bagaimana suatu organisasi seperti British Council yang bergerak di bidang pendidikan serta kebudayaan dapat turut berperan dalam menyebarkan pengaruh Inggris yang merupakan negara asalnya, serta membentuk dan menjaga suatu hubungan bilateral

dengan negara lainnya yang mana dalam kasus ini adalah Indonesia. Selain itu dengan melakukan praktik diplomasi publik melalui budaya seperti ini juga selain tentunya dapat membantu mewujudkan atau mencapai *national interest* dari Inggris itu sendiri namun juga memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat di Indonesia yang menjadi negara tujuannya, dimana program-program dari British Council ini dapat semakin meningkatkan kualitas individu-individu di Indonesia sehingga juga dapat menjanjikan masa depan yang cerah bagi mereka.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

1.2.1 Deskripsi Masalah

Dalam mencapai suatu tujuan nasional suatu negara tidak bisa hanya sepenuhnya mengandalkan kekerasan atau ancaman (*hard power*) saja, akan tetapi diperlukan juga dukungan dari pihak negara-negara lain. Untuk mendapatkan dukungan tersebut tentu suatu negara harus dapat merayu atau membujuk agar negara-negara lain tersebut mau memberikan dukungannya kepada negara mereka dalam melaksanakan tujuan-tujuan nasional atau *national interest*-nya (*soft power*).

Salah satu negara yang cukup sadar akan pentingnya menyebarkan pengaruh serta pemikiran mereka kepada dunia adalah Inggris. Inggris melihat sebagai bahasa internasional, pengajaran akan Bahasa Inggris cukup memiliki permintaan (*demand*) yang tinggi khususnya di negara-negara seperti Indonesia. Mereka memanfaatkan hal tersebut dengan mendirikan cabang British Council di Indonesia.

Dengan begitu mereka dapat mempromosikan pengaruh serta kepentingan mereka. Melalui pengajaran bahasa tersebut juga tentunya akan dapat meningkatkan reputasi Negara Inggris di mata masyarakat Indonesia.

Didirikan nya British Council cabang Indonesia juga mengindikasikan bahwa Pemerintah Inggris sadar akan pentingnya menjalin hubungan baik khususnya dengan negara yang memiliki kekuatan serta pengaruh cukup besar di kawasan-kawasan tertentu seperti Asia Tenggara, contohnya Indonesia. Salah satu cara untuk mewujudkan hubungan baik tersebut selain dengan melakukan kerjasama di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, maupun militer, tentunya adalah dengan melakukan tindakan diplomasi publik melalui Organisasi British Council ini. Dengan demikian jalan untuk kedua pemerintah negara tersebut saling bernegosiasi akan semakin terbuka karena kedua negara saling menjalin hubungan yang baik pula. Hubungan baik dengan Indonesia tersebut juga dapat dikatakan sebagai “batu loncatan” bagi Inggris untuk semakin memperkuat pengaruhnya di Kawasan Asia Tenggara. Dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana Inggris menerapkan strategi penggunaan *soft power* mereka melalui Organisasi British Council agar dapat menjalin hubungan baik dengan Indonesia sehingga kedepannya Indonesia akan lebih mudah dalam memberikan dukungannya terhadap Inggris dalam berbagai aspek yang tentunya juga akan dapat menguntungkan kedua belah pihak.

1.2.2 Pembatasan Masalah

British Council merupakan suatu organisasi yang sudah berdiri sejak tahun 1930 an dan hingga kini masih aktif dalam beroperasi. Aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan pun tersebar di seluruh belahan dunia, dimana mereka memiliki banyak kantor cabang di banyak negara di dunia. Untuk di Indonesia sendiri organisasi ini pertama kali tiba dan beroperasi pada tahun 1940 an sehingga tidak memungkinkan untuk kajian ini dilakukan tanpa adanya pembatasan masalah. Oleh karena itu pada penelitian ini penulis hanya akan berfokus pada rentang waktu tiga tahun saja yakni dari tahun 2017 hingga 2019. Rentang waktu tersebut dipilih oleh penulis lantaran dalam masa-masa tersebut, British Council Indonesia sedang banyak mengadakan program-program atau *event* yang skala nya cukup lebih besar dibandingkan program-program di tahun sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada layanan kursus Bahasa Inggris saja. Selain itu rentang waktu tersebut juga masih belum terlalu lama sehingga masih cukup relevan, juga diasumsikan bahwa sejumlah aktivitas yang British Council lakukan masih dapat berjalan tanpa adanya gangguan dari pandemi COVID-19 yang puncaknya baru terjadi pada awal tahun 2020.

1.2.3 Perumusan Masalah

Dari paparan-paparan yang sudah dikemukakan pada bagian-bagian sebelumnya maka didapat pertanyaan yang akan dijawab oleh penulis dalam penelitian ini yaitu, **“Bagaimana implementasi program-program British Council dalam Diplomasi Publik Inggris terhadap Indonesia 2017-2019 dalam rangka memelihara hubungan baik di antara kedua negara?”**

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi dari program-program British Council dalam kebijakan diplomasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah Inggris terhadap Indonesia. Serta untuk melihat atau memastikan apakah terdapat dampak signifikan yang ditimbulkan dari keberadaan British Council di Indonesia ini terhadap hubungan bilateral antara Inggris dan Indonesia. Dan jika memang ada maka dampak seperti apakah yang timbul akibat adanya implementasi program-program tersebut.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penulis disini berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan gambaran serta pemahaman mengenai salah satu contoh penggunaan *soft power* oleh suatu negara melalui strategi diplomasi publik atau budaya. Serta bagaimanakah implementasi program-program yang dilakukan dalam mewujudkan hal tersebut.

1.4 KAJIAN LITERATUR

Yang pertama dalam artikel berjudul *Cultural Diplomacy and the British Council: 1934-1939* yang ditulis oleh Philip M. Taylor dalam *British Journal of International Studies* 4, nomor 3 terbitan tahun 1978 ini dapat diketahui peranan British Council dalam pelaksanaan diplomasi publik atau diplomasi budaya Inggris. Pada tulisan ini dijelaskan bahwa organisasi ini merupakan organisasi non-pemerintah, namun mendapat dukungan dari pemerintah Inggris dimana dalam pelaksanaannya ditujukan kepada *Foreign & Commonwealth Office* (FCO) yang sejak September 2020 lalu berubah menjadi *Foreign Commonwealth & Development Office* (FCDO), untuk memastikan agar kinerja atau performa dari *British Council* ini tetap konsisten sesuai dengan pernyataan di *Royal Charter*.

Sisi historis dari alasan mengapa British Council ini dibentuk juga dibahas secara cukup lengkap dalam karya tulis ini. Dikatakan bahwa pada tahun 1929 organisasi ini muncul atas tindakan dari *Foreign Office* atau FO (sekarang FCDO), dimana pada saat itu timbul kesadaran akan dibutuhkannya suatu badan yang dapat menyebarkan suatu propaganda kebudayaan Inggris ke seluruh dunia. Hal ini juga dilakukan atas respon terhadap pendekatan Inggris yang cenderung agresif dalam usaha mencapai kepentingan luar negeri mereka, sehingga dirasa perlu diadakan cara atau pendekatan yang lebih damai dalam memenuhi hal tersebut. Dengan adanya propaganda kebudayaan ini juga dipercaya dapat semakin memperkuat pengaruh serta semakin menaikkan reputasi Inggris di mata dunia internasional, namun juga akan tercipta perdamaian dunia serta saling mengerti satu sama lain.

Dibahas pula seiring perkembangannya, semakin lama semakin banyak permintaan (*demand*) dari negara-negara lain yang menginginkan keberadaan British Council di negara mereka karena dirasa program-program yang mereka lakukan sangat positif dan berguna. Sehingga mulai terlihat bagaimana British Council ini memiliki peranan yang cukup besar dalam pencapaian kebijakan luar negeri Inggris. Lord William Tyrrell selaku mantan wakil menteri *Foreign Office* bahkan pernah berpendapat bahwa publisitas budaya mereka sangatlah penting tak hanya dalam pencapaian *national interest* namun juga untuk memperbaiki keadaan dunia internasional yang pada saat itu sedang buruk. Ia juga menambahkan bahwa strategi diplomasi budaya haruslah dianggap sama pentingnya seperti kekuatan militer.⁷

Kemudian pada jurnal yang ditulis oleh Resul Babaoglu berjudul *Linguistic Imperialism or Cultural Diplomacy? British Council and The People's Houses in Early Republican Turkey* dijelaskan mengenai salah satu implementasi program British Council di Turki pada awal tahun 1940 an. Program yang dimaksud adalah kursus-kursus Bahasa Inggris yang dilakukan dengan bekerjasama dengan People's House yang juga merupakan sebuah organisasi kebudayaan yang didirikan oleh Pemerintah Turki. People's House memiliki sejumlah kantor cabang yang tersebar di seluruh wilayah Turki. Keberadaan organisasi tersebut juga dianggap sangat membuka kesempatan bagi BC untuk mulai beroperasi di Turki sebab salah satu alasan utama dibentuknya People's House sendiri adalah untuk mempertahankan

⁷ Philip M. Taylor. "Cultural Diplomacy and the British Council: 1934-1939." *British Journal of International Studies* 4, no. 3 (1978): 244–65. <http://www.jstor.org/stable/20096842>. (diakses 26 September 2021).

dan meningkatkan reformasi dan kemajuan sosial di negara tersebut pada saat itu, sehingga British Council yang memang merupakan organisasi yang bergerak di bidang-bidang seperti edukasi dan kebudayaan sangat sejalan dengan hal tersebut.

Dalam jurnal ini Resul juga menyebutkan bahwa program kerjasama yang dijalankan oleh British Council di Turki melalui People's House tersebut merupakan suatu ekspansi kebudayaan yang terjadi atas dasar sedang maraknya kompetisi politik dan propaganda di kawasan Eropa pada masa itu, dimana negara-negara lainnya seperti Jerman dan Perancis juga sedang gencar-gencarnya melakukan ekspansi kebudayaan ke negara-negara lainnya. Pada masa itu di Turki komunikasi serta transportasi di beberapa wilayah masih belum banyak berkembang dan terbatas, akan tetapi British Council tetap hadir untuk memberikan kursus-kursus Bahasa Inggris di beberapa wilayah-wilayah terpencil di negara tersebut. Dalam kursus-kursus ini metode pembelajaran bahasa yang digunakan sudah modern dan berkualitas tinggi. Status perkembangan dari semua kalangan masyarakat yang mengikuti kursus ini juga terus dipantau dan dilaporkan. Hasilnya secara umum kursus-kursus tersebut mengakibatkan semakin populer atau maraknya penggunaan Bahasa Inggris di Turki sehingga untuk dapat menjalin hubungan antara Inggris-Turki pun semakin terbuka lebar.⁸

Terakhir, pada literatur ketiga yakni yang ditulis oleh Laurence Martin dan John Garnett berjudul *British Foreign Policy: Challenges and Choices for the Twenty-first Century*, membahas mengenai seperti apa gambaran kebijakan luar

⁸ Resul Babaoglu. "Linguistic Imperialism or Cultural Diplomacy? British Council and The People's Houses in Early Republican Turkey." *Bilig Winter 2021*, No. 96 (2021). 255-282.

negeri Inggris pada abad ke-20, serta perbedaan-perbedaan antara pada saat masa regionalisme serta globalisasi. Disebutkan bahwa umumnya yang diinginkan oleh orang-orang dari suatu kebijakan luar negeri adalah keamanan. Dalam buku ini disebutkan bahwa Inggris memang menggunakan aset-aset serta pengaruh yang mereka miliki untuk mempromosikan kepentingan-kepentingan nasional mereka.

Dibahas pula dalam karya tulis ini bahwa dalam perkembangannya pemerintah selalu mendapatkan tantangan dalam membuat suatu kebijakan luar negeri. Hal ini dikarenakan pilihan kebijakan luar negeri seperti apa yang akan diterapkan tidak hanya berdasarkan situasi yang terjadi di dunia internasional, akan tetapi juga harus dapat bisa diterima oleh publik atau masyarakat sipil dari suatu negara. Dalam mengkaji suatu kebijakan luar negeri, selain tentunya harus melihat kira-kira seberapa efektif kebijakan tersebut, para pembuat kebijakan juga harus memikirkan opini publik.⁹

Dari ketiga sumber literatur di atas penulis sangat setuju dengan paparan-paparan dari masing-masing penulis literatur-literatur tersebut. Ketiga nya meyakini bahwa British Council memang pada intinya merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh pihak Pemerintah Inggris atas dasar adanya keinginan untuk mencapai kepentingan-kepentingan nasional mereka melalui penggunaan *soft power*. Oleh karena nya disini penulis memilih untuk meneliti mengenai salah satu contoh dari hal tersebut yakni bagaimana implementasi dari program-program yang dibuat oleh British Council di Indonesia, sebab keberadaan organisasi tersebut

⁹ Laurence Martin and John Garnett. *British Foreign Policy: Challenges and Choices for the Twenty-first Century*. London: The Royal Institute of International Affairs, 1997.

tentunya bukan hanya semata-mata karena ingin membantu orang-orang dalam edukasi ataupun hal-hal lainnya. Akan tetapi karena memang terdapat maksud dan tujuan tersendiri yakni untuk dapat membantu Pemerintah Inggris dalam mencapai kepentingan-kepentingan nasional mereka.

1.5 KERANGKA TEORI

Untuk dapat meneliti kasus yang berhubungan dengan diplomasi publik ini tentu diperlukan pemahaman mengenai apa itu *soft power*. Salah satu orang yang pertama kali membahas mengenai konsep *soft power* adalah Joseph Nye. Ia memperkenalkan konsep ini sebagai suatu cara atau pendekatan alternatif dari penggunaan kekuatan militer atau ancaman kekerasan dalam upaya suatu negara untuk membuat negara lainnya mau melakukan apa yang negara tersebut perintah atau inginkan, hal ini dikarenakan *soft power* memiliki keterhubungan dengan kapabilitas suatu negara untuk mempengaruhi preferensi suatu negara lainnya, baik melalui budaya, ekonomi, kebijakan politik maupun hal lainnya.¹⁰ Nye awalnya membahas konsep *soft power* ini dalam konteks mengkaji kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Ia beranggapan bahwa Amerika Serikat tidak akan dapat mencapai tujuan-tujuan nasional mereka jika hanya sepenuhnya mengandalkan *hard power* dan bersikap hegemon, meskipun pada saat itu kekuatan militer serta ekonominya sedang bagus-bagusnya dan dianggap nomor satu di dunia. Ia beranggapan bahwa dengan memanfaatkan *soft power* maka akan mengundang

¹⁰ Joseph Nye. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: 2004. 5-5

ketertarikan serta dukungan dari pihak negara-negara lain terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat, dengan demikian dalam mewujudkan tujuan-tujuan nasional tersebut pun akan semakin mudah pula.¹¹

Ketika pertama kali memberikan definisi mengenai konsep tersebut, Nye menyebutkan bahwa *soft power* merupakan “*the ability to get what you want through attraction rather than coercion or payments*” akan tetapi definisi tersebut kemudian ia kembangkan kembali menjadi “*the ability to affect others through the co-optive means of framing the agenda, persuading, and eliciting positive attraction in order to obtain preferred outcomes*”.¹² Bicara mengenai sumber dari *soft power* itu sendiri ada tiga menurut Nye, yakni kebudayaan, nilai-nilai politik serta kebijakan luar negeri yang juga terkait dengan legitimasi dari suatu negara dalam dunia internasional serta kekuatan moral yang negara tersebut miliki.¹³ Dalam konteks kebudayaan, Joseph Nye membaginya menjadi dua jenis yakni budaya tinggi (*high culture*), serta budaya populer (*pop culture*). Budaya tinggi dapat diartikan sebagai produk-produk kebudayaan yang di nilai elit atau bernilai tinggi seperti tulisan-tulisan, edukasi, seni dan lainnya, sedangkan budaya populer merupakan hal-hal yang dianggap dapat menarik perhatian banyak orang, yang juga merepresentasikan kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang terjadi di kalangan masyarakat yang bentuknya dapat berupa film, musik atau berbagai bentuk lainnya. Bentuk kebudayaan yang dapat dimanfaatkan sebagai instrumen *soft power* ini

¹¹ Joseph Nye. “Soft Power and American Foreign Policy.” *Political Science Quarterly* 119, no. 2 (2004): 255–70. <https://doi.org/10.2307/20202345>. (diakses 26 September 2021).

¹² Singh, Navin Kumar, and Joseph S Nye. “The Future of Power.” *World Affairs: The Journal of International Issues* 16, no. 4 (2012): 160–65. <https://www.jstor.org/stable/48566262>.

¹³ Joseph Nye. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: 2004. 11

haruslah memiliki sifat universal agar orang-orang yang terlibat dapat berbagi nilai-nilai yang sama.¹⁴

Bicara mengenai diplomasi publik kata ‘diplomasi’ itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa definisi, antara lain sebagai berikut: (1) urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dan negara yang lain; (2) urusan kepentingan sebuah negara dengan perantara wakil-wakilnya di negeri lain; serta (3) pengetahuan dan kecakapan dalam hal perhubungan antara negara dan negara. Sedangkan kata ‘Publik’ sendiri memiliki arti kata orang banyak (umum) serta semua orang yang datang. Dari arti kedua kata tersebut, sekilas dapat kita ketahui bahwa diplomasi publik adalah suatu upaya yang dilakukan oleh satu negara dalam menjalin hubungan dengan negara lainnya dimana publik atau orang banyak juga ikut terlibat dalam prosesnya. Seperti yang sudah sempat disinggung sebelumnya USIA (*United States Information Agency*) dalam Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mendefinisikan diplomasi publik sebagai sebuah usaha untuk mempromosikan kepentingan nasional negara mereka dengan cara menumbuhkan pemahaman, menginformasikan serta mempengaruhi masyarakat di negara lain.¹⁵ Karena yang dijadikan target dalam aktivitas diplomasi publik ini adalah masyarakat atau orang-orang sipil maka sudah jelas jika diperlukan kemampuan komunikasi antar budaya yang baik, sebab terdapat

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Dian Effendi, Tonny. “Diplomasi Publik Jepang: Perkembangan dan Tantangan” (2011): 8-8

keterkaitan dengan berubahnya sikap masyarakat serta adanya saling pengertian dalam melihat persoalan-persoalan politik luar negeri.¹⁶

Sedangkan menurut Nye, diplomasi publik sendiri dapat diartikan sebagai sebuah instrumen yang digunakan oleh pemerintah dari suatu negara untuk memobilisasi sumber daya yang negara tersebut miliki guna berkomunikasi dengan dan menarik publik dari negara lain yang dijadikan tujuannya.¹⁷ Nye juga menjelaskan mengenai adanya tiga dimensi dalam aktivitas diplomasi publik. Dalam dimensi ketiga ia menjelaskan bahwa diplomasi publik juga memiliki tujuan untuk membangun hubungan dalam jangka waktu yang panjang dengan individu-individu penting melalui program-program yang dijalankan oleh suatu negara.¹⁸ Kemudian bentuk-bentuk pencapaian dari diplomasi publik itu sendiri ada lima menurut Alan K. Henrikson, yakni *consolidation*, *containment*, *penetration*, *enlargement* serta *transformation*.¹⁹ Dalam kasus diplomasi publik yang dilakukan oleh Inggris melalui British Council ini, dari kelima bentuk pencapaian tersebut *consolidation* dan *enlargement* merupakan yang paling sesuai atau cocok. Dimana *consolidation* sendiri berarti upaya yang dilakukan agar tercipta suatu pemahaman atau pengenalan atas negara yang melakukan upaya tersebut dari negara yang dituju. Sedangkan *enlargement* merupakan aktivitas yang dilakukan untuk

¹⁶ Sukawarsini Djelantik. *Diplomasi antara Teori & Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008. 191-191

¹⁷ Joseph S. Nye. "Public Diplomacy and Soft Power". *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* Vol. 616. (2008): 1-1

¹⁸ Ibid. 94-94

¹⁹ Alan K. Henrikson. "What Can Public Diplomacy Achieve?". <https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/publicdiplo.pdf>. (diakses 24 Januari 2023).

menyebarkan kepentingan nasional dari suatu negara melalui cara yang damai, tanpa adanya paksaan ataupun kekerasan.²⁰

Dari pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu yang paling membedakan antara diplomasi publik dan diplomasi tradisional adalah target atau sasaran nya. Diplomasi publik lebih menargetkan masyarakat sipil dimana opini publik di suatu negara yang telah dipengaruhi oleh tindakan diplomasi publik dari negara lain secara tidak langsung juga nantinya akan dapat mempengaruhi pemerintah nya pula. Berbeda dengan diplomasi tradisional yang sasaran nya secara langsung merupakan pemerintah dari suatu negara yang dituju. Akan tetapi perlu diketahui pula bahwa munculnya diplomasi publik bukan semata-mata untuk menggantikan praktik diplomasi terdahulu, melainkan untuk menjadi pelengkap dimana dengan adanya diplomasi publik dapat membuka jalan terjadinya negosiasi antar pemerintah suatu negara.²¹ Sehingga dapat dikatakan dalam diplomasi publik baik pemerintah maupun aktor-aktor non-pemerintah tetap sama-sama memiliki peranannya masing-masing.

Tujuan dari dilakukannya diplomasi publik tentu untuk membentuk serta mempengaruhi persepsi atau opini publik dari suatu negara terhadap negara lainnya yang melakukan diplomasi publik tersebut. Salah satu cara yang paling umum dalam meningkatkan citra suatu negara di mata masyarakat negara lainnya adalah melalui pengenalan berbagai bentuk kebudayaan yang dimiliki oleh negara tersebut

²⁰ Ibid.

²¹ Sukawarsini Djelantik. *Diplomasi antara Teori & Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008. 189-190

atau disebut juga sebagai diplomasi budaya (*cultural diplomacy*). Menurut Milton Cummings, diplomasi budaya dapat didefinisikan sebagai pertukaran ide, informasi, seni, serta aspek-aspek kebudayaan lainnya antara negara-negara di dunia yang dimaksudkan agar orang-orang saling memiliki pengertian yang kuat, melalui hal-hal atau kegiatan kultural yang dapat merepresentasikan seperti apa orang-orang dari suatu negara tersebut serta dapat mempengaruhi masyarakat di negara lain meskipun terdapat perbedaan politik di antara mereka.²² Dalam proses pertukaran ini tak hanya sebatas berbagi aspek-aspek seperti seni dan kebudayaan saja, akan tetapi juga menyangkut hal-hal seperti nilai-nilai serta ide yang mereka percayai, jurnalisme, serta isu-isu lainnya.²³ Oleh karenanya didapat konsep dari diplomasi publik yang baru yakni suatu reaksi dari hubungan kebudayaan, pers, serta aktivitas pertukaran informasi.²⁴ Oleh karenanya diplomasi publik melalui jalur budaya ini dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat di negara yang dituju, karena memang nilai-nilai yang dianut oleh negara pelaku pun ikut disebarkan pula.

²² Academy for Cultural Diplomacy. Comment on Cultural Diplomacy by John Hemming. <https://www.culturaldiplomacy.org/academy/index.php?comment-on-cultural-diplomacy-4> (diakses 2 Januari 2022)

²³ Mette Lending. *Change and Renewal: Norwegian Foreign Cultural Policy 2001–2005* (Oslo: Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 2000). 14

²⁴ Ibid.

1.6 METODE PENELITIAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1.6.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode kualitatif. Metode ini memiliki sifat deskriptif dan cenderung mencari sebuah makna dari data yang didapatkan dari hasil sebuah penelitian.²⁵ Disini penulis memilih menggunakan metode tersebut lantaran lebih tepat jika digunakan untuk mengkaji kasus-kasus atau isu yang berhubungan dengan sosial budaya seperti ini. Juga karena mengingat nanti nya bentuk-bentuk atau jenis data yang akan digunakan kebanyakan berupa tulisan-tulisan atau narasi, sehingga hasil penelitian pun akan berupa pernyataan-pernyataan pula dan tidak akan terlalu banyak menggunakan angka-angka.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan dengan cara studi pustaka dengan mengkaji secara mendalam literatur-literatur yang tersedia secara *online*. Data yang digunakan berjenis sekunder dimana sumber-sumber yang akan digunakan antara lain dapat berupa buku, jurnal-jurnal akademik, artikel-artikel berita maupun sumber-sumber lainnya yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan kebenarannya. Selain itu juga akan menggunakan sumber-sumber yang didapat dari

²⁵ UNM. *Metode Penelitian Kualitatif Dengan Jenis Pendekatan Studi Kasus*. <http://penalaran-unm.org/metode-penelitian-kualitatif-dengan-jenispendekatan-studi-kasus> (diakses 4 November 2021).

laman resmi pemerintah Inggris dan Indonesia serta tentunya yang juga berasal dari British Council itu sendiri secara langsung.

1.7 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Secara sistematika pembahasan penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

- **BAB I**

Berisi gambaran latar belakang dari isu yang dikaji, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka teori, metode penelitian yang akan digunakan serta teknik pengumpulan data

- **BAB II**

Membahas secara mendalam aktor utama dalam penelitian ini yakni Negara Inggris dan Organisasi British Council itu sendiri.

- **BAB III**

Membahas bagaimana implementasi sejumlah program British Council dalam diplomasi publik Inggris terhadap selama tahun 2017-2019 yang juga kemudian dikaji dengan teori-teori *soft power* dan diplomasi publik.

- **BAB IV**

Kesimpulan